

POLITIK PROSTITUSI KOTA SURABAYA

(Studi Deskriptif: Eksistensi Dolly)

Cemi Fitriani Jamal*

Abstrak

Pembahasan pada penelitian kali ini dengan judul Politik Kota Surabaya (Study Kasus: Eksistensi Dolly), menitik beratkan pada penjelasan mengenai permainan yang terjadi dalam zona politik abu-abu tersebut. Dimana yang terjadi sangat terselubung. Prostitusi merupakan masalah pelacuran yang memiliki pengaruh cukup besar bagi berbagai pihak. Pengaruh akan perkembangan moral, gaya hidup, aspek sosial dan lain sebagainya. Dolly merupakan salah satu prostitusi besar di Indonesia, khususnya Surabaya. Banyak kecemasan dan kekhawatiran yang di sebabkan oleh berkembangnya prostitusi tersebut. Hingga saat ini, Dolly masih dapat menjalankan bisnis pelacurannya tanpa takut adanya kecaman dari pihak yang menentang kehadiran mereka. Pada penelitian kali ini akan menjelaskan mengenai segala hal yang mendasari berkembangnya prostitusi tersebut melihat adanya faktor kekuasaan dan wewenang, serta bagaimana Dolly menjadi zona dalam berpolitik. Prostitusi berkembang bukan hanya di sebabkan karena keadaan sosial para wanita harapan tersebut, namun juga di karenakan banyaknya ketertarikan dari oknum-oknum tertentu yang membuat Dolly semakin memiliki karakter tersendiri dan menghasilkan keuntungan yang besar. Segala kelas masyarakat ikut terlibat. Dari yang hanya lulusan SD, memiliki wajah cantik dan badan yang bagus, dapat menjadi pekerja seks. Aparat militerpun ikut serta memanfaatkan lokalisasi Dolly dalam menjalankan fungsinya atas dasar kekuasaan yang mereka miliki agar tercapainya visi misi serta melebarkan kekuatan politik mereka. Dan tentu saja beberapa partai politikpun tentu ikut menggunakan wilayah prostitusi tersebut untuk kepentingan mereka.

Key Word: prostitusi, kekuatan politik, Eksistensi Dolly.

Abstract

Discussion on the research this time with Political titles city of Surabaya (Case Study: the existence of Dolly), drip at a series on the explanation of the game happens in the political gray zone. Which happens very veiled. Prostitution is practised prostitution problem is large enough for the various parties. Will influence the development of morality, lifestyle, social aspects and more. Dolly is one of Indonesia's major prostitution, especially in Surabaya. Much to the dismay and concern caused by the development of prostitution. Up to now, Dolly can still run the business without fear of pelacurannya the existence of criticism from those who oppose their presence. At this time the research will explain everything that underlies the growing prostitution notice any power and authority factors, as well as how Dolly became a zone of politicking. Prostitution is growing not just because social circumstances caused the women of hope, but also abundance of interest in karenakan persons certain persons that make Dolly increasingly has its own character and make a huge profit.

All classes of the community get involved. From that only graduates of the elementary school, has a beautiful face and a nice body, could be a sex worker. Apparatus militerpun participated at localization in menjalankan exploit its function over the Dolly base of power at their disposal in order to achieve the vision and mission as well as widen their political power. And of course some of the politikpun party of using the prostitution took to their interests.

* Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, email: pinkyelse@gmail.com

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Prostitusi adalah suatu tindakan yang menawarkan pelayanan langsung dari seseorang kepada siapapun untuk mendapatkan imbalan berupa uang atau apapun. Dalam lingkup kehidupan masyarakat Surabaya, prostitusi telah menjadi bagian dari gaya hidup dan bagian dari isi kota. Fenomena prostitusi bergerak bersama dengan perkembangan kota. Banyak pro dan kontra terjadi mengenai eksistensi dari bisnis prostitusi tersebut. Bahkan terjadi perdebatan mengenai terminologi tentang penyebutan istilah 'prostitusi' itu sendiri. Hal itu mungkin di rasa lebih baik dari pada dengan menyebut 'pekerja seks komersil', bahkan kini mereka menyebut diri sebagai 'wanita harapan'.

Prostitusi membuka karakter dari kegiatan seksual yang di komersialkan dengan kegiatan lainnya yang berorientasi komersial. Sedangkan istilah 'pekerja seks' lebih kepada menggambarkan karakter yang lebih penting bagi mereka yang sadar akan sifat serupa dari seks yang memiliki orientasi komersial dengan kegiatan lain yang bersifat komersil. Prostitusi dapat terjadi di Surabaya juga di sebabkan oleh karena Surabaya merupakan kota yang besar dan merupakan kota pelabuhan. Banyak para pendatang yang singgah dari berbagai tempat dan hal itu juga yang menyebabkan tumbuhnya lahan sebagai pasar prostitusi. Selain menjadi kota pelabuhan, Surabaya juga merupakan kota terakhir dari lintasan kereta api dan memiliki pangkalan Angkatan Laut (AL). Pada kasus Surabaya, para germo dan pekerja seks komersil (PSK) atau kita sebut juga dengan pelacur, mereka sangat berperan untuk membuka kawasan baru dan mengembangkannya menjadi suatu wilayah kawasan bisnis prostitusi. Dalam sejarah kota Surabaya pada tahun 1864, terdapat 228 pelacur di rumah-rumah bordil kawasan bandara dan di pinggir pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pada masa kedudukan Jepang di tahun 1840, muncul tempat yang terkenal yaitu Kembang Jepun. Para pekerja seks bekerja untuk memuaskan hasrat mereka dengan para tentara yang sedang berperang.

Setelah merdeka, bisnis seks di kota Surabaya justru semakin meningkat. Menurut catatan terbaru, saat ini terdapat 6 tempat kawasan prostitusi di Surabaya. Di kawasan

Surabaya Utara terdapat tempat bagi para pekerja seks komersil yang terletak di kawasan Krembangan. Lalu terdapat pula lokalisasi Jarak, dimana para pekerja seks komersil di tempat tersebut merupakan pindahan dari Jagir dan Wonokromo. Bukan hanya itu saja, ada juga kawasan Moroseneng dan Klakah Rejo yang keduanya berada di kecamatan Benowo. Makam Kembang Kuningpun tidak luput dari bisnis prostitusi tersebut, dan sudah ridak asing bagi para penjaja seks. Yang paling besar terletak di Jl. Kupang Gunung Timur dan Putat Jaya yaitu gang Dolly yang sudah ada sejak tahun 1960-an dan hingga kini tetap menjadi tempat populer dan menjadi idola. Akibat begitu banyaknya dan besarnya bisnis seks di kawasan tersebut, maka banyak berbagai kalangan menyebutkan bahwa Dolly merupakan icon (simbol) bagi kota Surabaya.

Apabila dilihat, Dolly memang memiliki tempat yang cukup strategis dan cara menjajakan para pekerja seks pun secara dramatis, dengan mendudukan mereka di balik kaca besar seperti barang yang memang untuk diperdagangkan. Pada mulanya Dolly adalah kawasan makam yang terdapat di daerah yang sepi. Lalu tempat tersebut di bongkar dan mulai di jadikan tempat tinggal. Pada tahun 1980-an, ketika Surabaya di pimpin oleh Walikota bapak Muhaji Wijaya, Dolly sudah menjadi kawasan pelacuran yang sangat ramai dan bertambah besar. Hingga kini kawasan tersebut semakin bertambah ramai. Walau tidak terpasang papan bertuliskan nama Dolly, namun semua orang sudah mengetahui dan kawasan tersebut memiliki nilai jual serta daya tarik dan magnet tersendiri. Para pekerja seks yang di pajang di balik kaca seperti ikan dalam akuarium tersebut sudah menjadi ciri khas bagi wilayah prostitusi tersebut.

Dolly merupakan kawasan terbesar di Asia Tenggara, mungkin apabila kita lihat dari segi luas tempat mungkin masih banyak tempat pelacuran yang besar dan luas. Namun dalam hal ini yang di maksud 'besar' adalah di lihat melalui segi popularitas serta bagaimana permainan bisnis prostitusi tersebut berkembang di dalamnya. Dari segi popularitas Dolly telah mampu mengalahkan pelacuran besar di PhatPhong Bangkok dan Genyhang Thailand. Di kawasan Dolly banyak terdapat wisma, cafe dangdut, salon, panti pijat plus-plus, pedagang kaki lima, salon, toko naju, dan lain sebagainya. Yang dimana hal tersebut

merupakan gambaran tentang wilayah tersebut yang telah menjadi sandaran hidup masyarakat setempat.

Beberapa pihak memiliki pendapat, mengapa prostitusi tersebut hingga saat ini kurang mendapat penanganan yang jelas. Kemungkinan besar mengapa daerah prostitusi tersebut di pertahankan adalah karena dapat memberikan pengaruh antara lain pengaruh dalam bidang ekonomi yang cukup besar. Apabila di lihat sebenarnya banyak berbagai versi cerita mengenai prostitusi dan semua yang berkecimpung di dalamnya. Pro dan kontra serta berbagai macam tindakan yang di ambil oleh pemerintah kota beserta partai politik yang turut andilpun sesungguhnya memiliki tanda tanya besar. Maraknya para pekerja seks di kawasan Dolly juga memiliki alasan yang berbeda bagi setiap individunya. Sesungguhnya hal-hal seperti ini yang sebenarnya dapat menjadi cermin bagi kita akan kurangnya perhatian pemerintah akan sumber daya manusia. Kurangnya lapangan kerja dan binaan untuk memberikan keahlian kepada masyarakat Indonesia agar mereka menjadi manusia yang memiliki ke ahlian khusus dan dapat membangun suatu usaha ataw mendapatkan mata pencaharian yang lebih layak.

Dalam hal menyikapi kawasan prostitusi tersebut, Pemerintah Kota sepertinya mengalami banyak kendala, karena dapat kita lihat hingga saat inipun kegiatan bisnis prostitusi tersebut dapat berjalan dengan cukup lancar tanpa adanya rasa takut akan penggusuran dan lain hal sebagainya. Padahal jelas menurut Peraturan Daerah No. 7 tahun 1999, sudah jelas di sebutkan bahwa melarang di gunakannya bangunan sebagai tempat berbuat kegiatan asusila. Beberapa masyarakat yang peduli akan hal tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Kota kurang serius untuk menangani meluasnya bisnis prostitusi tersebut. Memang perlu di pertanyakan mengenai Peraturan Daerah tersebut yang kurang dapat di laksanakan sebagaimana mestinya.

Sebenarnya sejak awal masyarakat kurang setuju akan keberadaan tempat prostitusi tersebut. Banyak yang menuntut untuk dapat di selesaikan secara tuntas mengenai permasalahan tersebut, bukan hanya di relokasikan saja tentunya. Sebenarnya pemerintah tidak pernah memberikan izin ataupun mengesahkan kepada Dolly yang telah

hadir sejak tahun 1960-an. Secara hukum sudah jelas prostitusi di larang. Bahkan gencar pula mediasi tentang undang-undang anti pornografi. Serta berbagai aksi penolakan terhadap segala sesuatu yang berbau keseksian dan segala hal yang dapat di kategorikan sebagai kegiatan asusila. Namun Dolly hingga saat ini masih berdiri dan tetap bertahan menjalankan aktivitas bisnis prostitusi tersebut di setiap harinya. Bahkan dalam pelaksanaan politikpun Dolly memiliki hak yang sama seperti hak untuk memilih, hak untuk ikut dalam kampanye. Bahkan para calon legislatifpun datang untuk memberi dukungan dan ingin mengubah nasib para pekerja seks. Dari hal ini dapat di lihat bahwa tidak adanya keseriusan dari pemerintah Kota dalam mengatasi permasalahan mengenai prostitusi tersebut, tetapi justru memberikan kenyamanan dan ke'sah'an terhadap kegiatan bisnis seks yang sampai sekarang masih terus berjalan. Padahal sudah jelas terlihat bahwa semua itu tidak sesuai dengan Indonesia sebagai negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Berbagai rencana mengenai penanganan Dolly belum mendapat suatu keputusan yang pasti. Hal ini dapat terlihat pada berbedanya argumen yang di keluarkan dari berbagai pihak. Seperti pada saat kampanye, demi mendapat suara yang banyak bahkan beberapa calon legislatif harus mengatakan bahwa mereka melegalkan Dolly dan prostitusi. Tetapi di lain kesempatan argumen yang keluar justru berbeda. Kejadian seperti ini sering terjadi hingga tak terhitung lagi. Akibat banyaknya kepentingan yang akhirnya justru menutupi apa yang seharusnya di lakukan dalam menegakan hukum sesuai Undang-Undang yang telah berlaku. Kurangnya pertimbangan akan keputusan yang akan di ambil dalam penanganan membawa keraguan yang mendasar. Prostitusi ilegal banyak di suarakan, namun hadir pula prostitusi legal dengan berbagai macam argumen.

Dolly juga merupakan salah satu tempat penjualan dan eksploitasi terhadap wanita dan anak-anak. Hal seperti itu sudah sangat jelas terlihat. Dari berbagai orang yang telah mengadakan penelitian, hingga media massa. Itu jelas terdapat pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Namun beberapa pendapat mengutarakan bahwa prostitusi apabila di awasi dengan ketat maka akan dapat menjadi penggerak roda ekonomi bagi Pemerintah Kota.

Samapi dengan saat ini belum ada tindakan tegas dari Pemerintah kota mengenai Dolly sebagai salah satu tempat prostitusi.

Dolly jelas memiliki pengaruh tersendiri serta keistimewaan, sehingga di tengah ancaman dan kecaman dari pihak yang kontra dengan kegiatan mereka, prostitusi Dolly masih dapat bertahan dan berjalan hingga saat ini. Bahkan semakin marak tanpa harus menyembunyikan identitas para pelacur dan kegiatan yang mereka lakukan dari publik. Samapi sekarang belum adanya upaya untuk memberi ketegasan mengenai keberadaan Dolly secara hukum sebagai sarana prostitusi. Kejelasan mengenai legalitas Dolly masih dipertanyakan. Dari Pemerintah Kota Surabaya belum menghasilkan keputusan mengenai bisnis prostitusi tersebut. Apabila memang ilegal, mengapa hingga saat ini kegiatan bisnis prostitusi di tempat tersebut masih berjalan hingga saat ini. Namun apabila legal, mengapa pihak Pemerintah Kota serta oknum yang memiliki peran serta kekuasaan dan kewenangan terhadap masyarakat dan wilayah kota Surabaya tidak dapat memberikan keterangan secara jelas tentang adanya kebijakan mengenai kelegalan wilayah prostitusi tersebut. Ketua komisi D DPRD Surabaya, Ahmad Jabir, menuding Pemerintah Kota tidak punya niat untuk merelokasi prostitusi Dolly

Pada era orde baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kawasan Dolly tersebut belum seberapa terekspos. Hal itu disebabkan oleh keadaan masyarakat yang masih dalam masa pemulihan dari kemerdekaan, media yang belum terlalu meluas, serta perhatian tertuju pada sosok Presiden Soeharto akan pembangunan yang dilakukan kepada bangsa Indonesia pada masa itu.

Hingga kini Dolly masih dapat bertahan. Banyaknya konflik yang hadir dalam prostitusi tersebut. Tidak menjadi penghalang bagi kaum Dolly untuk terus aktif dan berkembang menjalankan kegiatannya dalam bisnis seks. Keberanian yang dimiliki oleh setiap pelaksana bisnis seks tersebut tentunya memiliki kekuatan yang berasal dari oknum-oknum yang berkepentingan. Sehingga kehadiran Dolly masih dipertahankan hingga saat ini. Mulai dari berbagai macam penggusuran yang terjadi di Surabaya menimpa masyarakat yang dianggap mengganggu perkembangan kota Surabaya dan

yang dianggap tidak sesuai hukum yang berlaku baik status identitas dan perijinannya. Apabila ditelusuri lebih jauh tentu saja hal ini akan menimbulkan spekulasi adanya pihak-pihak yang berkuasa yang bermain di belakang bisnis prostitusi tersebut. Keberadaan Dolly telah menarik berbagai banyak pihak untuk berpartisipasi, baik dalam bisnis seksualitas berupa kepemilikan wisma, pengelola, pelayan serta para pekerja seks komersil dan terjadinya trafficking. Segala sesuatu hal tentunya memiliki keuntungan bagi yang terkait.

Politik adalah salah satu lingkup mengenai kekuasaan, kewenangan dan keuntungan tersendiri. Setiap individu manusia berusaha memperoleh kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan akan tujuannya. Dolly memiliki kekuatan sehingga dapat eksis hingga saat ini. Tentu saja semua itu dapat terlihat dari maraknya pelaksanaan bisnis seksualitas di tengah kecaman yang diterima. Sering dijumpai berbagai aksi masyarakat dan organisasi yang menyerukan pendapat mereka akan ketidaksetujuan terhadap prostitusi. Namun hingga kini hal itu hanya menjadi berita belaka. Tidak ada pernah ada pembahasan yang nyata mengenai tanggapan akan kontra tersebut.

Berbagai kegagalan akan kekuatan yang melatarbelakangi keaktifan Dolly dalam eksistensinya hingga saat ini, menghadirkan banyaknya pendapat. Melihat banyaknya wilayah Dolly yang sarat akan konflik dan kepentingan, berbagai pihak politik pun tentu saja tidak akan melepaskan daerah tersebut sebagai lahan berpolitik bagi kepentingan visi dan misi mereka. Sejarah partai politik yang eksis dalam perkembangan prostitusi wilayah Dolly dapat dilihat pada tahun 1987, yang di mana pada saat itu daerah tersebut dikuasai oleh militer. Juga adanya berbagai informasi mengenai keterkaitan partai politik dalam menjalankan kegiatan mereka di daerah Dolly. Berbagai pihak tentunya memiliki kepentingan yang saling terkait antara keuntungan satu sama lain. Hal inilah yang membuat berbagai aparat bahkan para politikus tidak pernah memikirkan untuk menyingkirkan wilayah prostitusi Dolly.

Rumusan Masalah

Dengan berbagai fenomena yang telah dijelaskan, serta berbagai hal yang terkait dengan politik prostitusi kawasan Dolly. Maka untuk lebih mengarahkan pembahasan mengenai

permasalahan tersebut, maka akan di rumuskan kedalam dua permasalahan :

1. Bagaimana peta dan format koalisi kekuatan politik di wilayah Dolly ?
2. Bagaimana pengaruh kekuatan partai politik dalam menopang keberadaan Dolly?

Kedua permasalahan tersebut di atas di harapkan akan mampu menggambarkan sekaligus menjawab pertanyaan mengenai politik prostitusi kota Surabaya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini di buat memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

- Mendiskripsikan dan mencari jawaban mengenai prostitusi Dolly sebagai bagian dari politik prostitusi kota Surabaya, serta berbagai faktor yang mempengaruhinya.
- Dengan penelitian ini, di harapkan dapat mengetahui pengaruh dari partai politik dalam perkembangan Dolly sebagai bagian dari politik prostitusi kota Surabaya.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk :

- Memberi kontribusi akademis bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik, terutama mengenai study politik prostitusi yang hingga kini masih menjadi perdebatan.
- Sebagai tambahan referensi bagi khalayak umum mengenai peran partai politik dalam menanggapi politik prostitusi kota Surabaya.

II. KAJIAN TEORITIK DAN TINJAUAN PUSTAKA

Teori Koalisi

Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai. Dalam hubungan internasional, sebuah koalisi bisa berarti

sebuah gabungan beberapa negara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Koalisi bisa juga merujuk pada sekelompok orang/warganegara yang bergabung karena tujuan yang serupa. Koalisi dalam ekonomi merujuk pada sebuah gabungan dari perusahaan satu dengan lainnya yang menciptakan hubungan saling menguntungkan (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Koalisi>).

Hakikat koalisi pada dasarnya adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomous), dan tahan lama (durable).

Koalisi dalam tradisi politik parlementer sesungguhnya sudah lama hadir dan menjadi bagian dari pembentukan pemerintahan, tradisi inipun sudah berlangsung lama di negara-negara eropa.

Menurut Andrey Heywood, Koalisi adalah penggabungan sekelompok partai politik yang berkompetisi, secara bersama-sama memiliki persepsi tentang kepentingan, atau dalam menghadapi ancaman, serta dalam penggalangan energi secara kolektif.

Sedangkan konsep Wiliam Rikar sendiri dalam pandangannya mengenai koalisi dimaknai sebagai *three or more person game* the main activity of the players is to select not only strategies, but partners. Partners once they become such, then select a strategy.

Konsep demokrasi konsosiasional memandang desain dan pola koalisi adalah bagian dari sebuah kensensus politik dan proses tawar menawar dari berbagai kelompok politik yang ada di dalam masyarakat yang memiliki beragam kepentingan masing-masing, termasuk partai politik.

Konsep Koalisi Menurut Arend Lijphard dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi dua kelompok yaitu, koalisi pertama, yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan (*policy blind coalitions*) dan koalisi yang didasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasikan (*policy-based colitions*).

Bentuk koalisi kelompok pertama menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi di parlemen, *minimal winning coalitions* dan asumsi partai bertujuan *office seeking* (memaksimalkan kekuasaan). Bentuk koalisi seperti loyalitas peserta koalisi tidak terjamin dan sulit diprediksi koalisi kedua, menekankan kesamaan dalam preferensi kebijakan, *minimal*

connected coalition (terdiri dari partai-partai yang sama dalam skala kebijakan dan meniadakan partner yang tidak penting), dan asumsi koalisi partai, bertujuan policy seeking, yaitu mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai.

Berikut model-model teori koalisi :

Policy Blind Coalitions Theory: Menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi Minimal winning coalition (William Riker) Asumsi partai bertujuan office seeking (maksimalisasi kekuasaan) Loyalitas peserta koalisi tidak terjamin Sulit diprediksi, juga range ukuran jumlah partai sangat beragam

Policy Based Coalitions Theory Menekankan kesamaan dalam preferensi kebijakan Minimal connected coalition (Robert Axelrod) Asumsi partai bertujuan policy seeking (mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai). Loyalitas peserta koalisi secara minimal diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan Koalisi bisa sangat gemuk dengan melibatkan partai-partai yang tidak perlu agar tujuan kebijakan (Sumber: Sri Budi Eko Wardani 2007)

Secara garis besar, berdasarkan jenisnya, koalisi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: Koalisi Potensial, yaitu suatu keadaan dimana terdapat kepentingan yang muncul, bisa menjadi koalisi jika tindakan kolektif diambil. Koalisi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu Latent (belum terbentuk menjadi koalisi aktif) dan Dormant (terbentuk sebelumnya tapi sudah tidak aktif). Koalisi Aktif, yaitu koalisi yang sedang berjalan. Koalisi ini dibagi menjadi dua, yaitu koalisi mapan (established) dan koalisi temporer (temporary). Koalisi mapan merupakan koalisi yang aktif, relatif stabil, dan berlangsung dalam rentang waktu tak terbatas. Sedangkan koalisi temporer adalah koalisi yang dibentuk untuk jangka pendek, fokus pada isu tunggal.

Koalisi Berulang (recurring), yaitu koalisi temporer yang berlanjut karena isu belum terpecahkan. Mengacu pada teori Arend Lijphart, setidaknya terdapat empat teori koalisi yang bisa diterapkan di Indonesia, yaitu:

Minimal Winning Coalition prinsip dasarnya ialah maksimalisasi kekuasaan. Dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi.

Minimum Size Coalition yaitu, Partai

dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas.

Bargaining Proposition, yakni koalisi dengan jumlah partai paling sedikit. Prinsip utamanya ialah untuk memudahkan proses negosiasi dan tawar-menawar karena rekanan koalisi yang sedikit. Tetapi bukan jaminan akan lancar. Jumlah partai tidak terlalu menentukan.

Minimal Range Coalition, dasar dari koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis memudahkan partai-partai untuk berkoalisi membentuk kabinet. Koalisi ini sering diterapkan dalam dunia nyata. Dasar koalisi ini lebih dikarenakan masing-masing partai yang berkoalisi memiliki kedekatan dalam orientasi kebijakannya.

Teori Kekuatan Politik

kekuatan politik adalah penaklukan dari kependudukan suatu kelompok yang kuat yang memiliki dominasi terhadap kelompok yang lemah. Kekuatan politik hadir di mulai dari pembentukan suatu negara atau wilayah atau juga kelompok yang memiliki kekuatan dan kewenangan dalam memutuskan serta menghasilkan kekuatan untuk memperjuangkan tujuan mereka.

Kehadiran mereka yang dapat menjadi kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan dan mempertahankan wilayah mereka dari segala permainan dan tuntutan (demands) dan juga adanya suatu hal berupa dukungan (supports). Outputs dari sistem politik mencakup Undang – Undang dan lain sebagainya. Serta feedbacks menunjukkan bahwa outputs atau kebijakan publik yang di buat pada suatu saat tertentu pada gilirannya dapat mengubah lingkungan dan tuntutan yang akan muncul berikutnya serta karakter dari sistem politik tersebut.

Teori kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan (interest Group “Gabriel Almond”) adalah salah satu organisasi atau kumpulan individu yang berusaha untuk memperoleh kebijakan dan kekuasaan. Kelompok kepentingan memiliki beberapa tipe, yaitu dalam penelitian kali ini dapat di klarifikasi menjadi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi berdasarkan sosial kedaerahan dan Organisasi Kemasrakatan berdasarkan kepemudaan.

Konseptualisasi

Prostitusi adalah tindakan menawarkan pelayanan atau memberikan pelayanan seksual langsung dari seorang pekerja seks kepada siapapun demi mendapatkan uang atau imbalan dalam bentuk lain. Politik Prostitusi dalam pelaksanaan prostitusi, berbagai hal dilakukan dan membentuk suatu kekuatan tersendiri yang berasal dari para pelaku dan mereka yang berkepentingan. Prostitusi merupakan hal yang memiliki pengaruh besar bagi para pihak yang bermain dalam dunia politik. Dimana keadaan sosial setiap individu dapat memberi keuntungan satu sama lain, dan mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Setiap pihak yang terkait dalam kegiatan prostitusi memiliki peran dan kewenangan tersendiri. Faktor kekuasaan sangat berpengaruh dan itu pula yang nantinya dapat menghasilkan suatu keuntungan bagi tujuan perorangan atau organisasi.

Dalam penelitian ini kami menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Penelitian kualitatif di tujukan agar penelitian dapat memperoleh data secara komprehensif. Penelitian bersifat kualitatif sehingga informasi dapat di ketahui dari informan, wawancara di maksudkan untuk mengetahui data dari individu, organisasi dan lembaga sosial masyarakat (LSM) dan juga beberapa aparat serta Pemerintah Kota untuk kebutuhan informasi tertentu, mereka yang di wawancarai inilah yang di sebut informan. Informan menjadi pangkal pengumpulan data atau disebut juga key informan.

Subyek Penelitian pada penelitian kali ini tertuju kepada Politik Prostitusi terkenal di Surabaya yang mengangkat kepada pembahasan terhadap daerah Dolly sebagai tempat bisnis prostitusi. Dengan meneliti mulai dari dasar dengan mengamati sejarah berdiri hingga berkembangnya Dolly, juga mewawancarai pihak yang terkait dalam hal ini. Mencakup para pengelola wisma, pekerja seks, Ketua Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), hingga pemerintah kota Surabaya, Dinas Sosial dan Tata Kota, juga tanggapan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Jawa Timur mengenai prostitusi tersebut.

Subyek di peroleh melalui Snowball

sampling, dimana di dalam Snowball sampling yang menjadi informan kunci akan mengarahkan kepada informan lain yang juga dapat memberi data serta informasi yang berhubungan dengan penelitian. Informan kunci di tentukan dengan berbagai pertimbangan untuk lebih mempermudah mengakses data sesuai tema. Dalam Snowball sampling informan terbagi menjadi 3;

1. Informan kunci (key informan), Melalui ibu Drs. Sri Endah, saya di arahkan untuk menghubungi bapak Kartono yang merupakan anggota dari Tim Indonesia Act, COP dan pemilik taman baca 'Kawan Kami' yang berada di daerah Putat Jaya. Beliau merupakan aktivis yang tertuju pada kasus perdagangan orang (Trafficking) terutama anak - anak. Lalu melalui beliau saya di kenalkan ibu Vera dari Yayasan Abdi Asih. Melalui peran serta sejarah mereka Ysng menjadiksn mereka sebagai informan kunci.
2. Informan Utama, Mereka yang secara langsung merupakan pelaku dan memiliki. Interaksi sosial yang dekat dengan subyek penelitian. Informan utama pada penelitian kali ini adalah Kepala Camat, Komando Rayon Militer, Komando Polisi Sektor, Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga, pengelola wisma dan pihak - pihak dari partai yang terdapat pada lokasi penelitian.
3. Informan Tambahan , Mereka yang memberikan informasi, baik yang berinteraksi secara langsung maupun tidak dalam lingkungan dari subyek penelitian.

Tehnik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini, data yang di peroleh dengan mengklarifikasi data primer dan data sekunder:

Data Primer. Data - data dan informasi yang di peroleh melalui berbagai media pustaka, jurnal, serta media cetak seperti koran dan majalah. Juga informasi melalui media internet.

Data Sekunder. Data - data dan informasi yang di peroleh melalui wawancara dengan beberapa sumber informasi, antara lain Perwakilan dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA), Ketua Rukun Warga (RW) wilayah Putat Jaya, beberapa perwakilan dari ketua dewan serta para pelaku prostitusi dan juga berbagai pihak perwakilan dari daerah Putat Jaya, beberapa oknum pun menjadi sumber informasi.

Koalisi yang berperan dalam prostitusi Dolly, Industri seks dijalankan oleh sederetan aktor yang berbeda dengan pereannya masing-masing. Mereka antara lain :

Musyawarah Pimpinan Kota (MUSPIKA), adalah suatu kepengurusan yang di bentuk dalam wilayah prostitusi Dolly yang berperan untuk mengontrol segala kegiatan hingga keamanan dan tata tertib yang berlaku. MUSPIKA itu sendiri terdiri dari :

- a. **Komando Distric Militer (KORAMIL)**, dalam pelaksanaannya di daerah Dolly, KORAMIL senyatanya terlihat bertugas memeriksa keadaan dengan melakukan patroli.
- b. **Komando Polisi Sektor (KAPOLSEK)**, berperan menegakkan semua Undang-Undang yang berkaitan dengan sektor seks di daerah tersebut.
- c. **Kecamatan**, memiliki peran sebagai pembuat keputusan yang bertanggung jawab akan suatu wilayah di dalam daerah suatu kabupaten. Dalam kepengurusannya di wilayah Dolly, camat berfungsi juga sebagai perantara untuk mensosialisasikan ketentuan yang telah di putuskan oleh MUSPIKA.

Pemilik Rumah Bordil, Yang memberikan fasilitas bagi pengelola untuk menjalankan usahanya dan memberikan fasilitas serta imbalan kepada pengelola, di karenakan sang pemilik rumah pelacuran tersebut banyak yang menyembunyikan jati dirinya. Sehingga mereka menyuruh orang lain untuk mengelola dan memakai nam mereka untuk menjalankan bisnis prostitusi tersebut. Para pekerja yang terdapat di dalam rumah bordil itu antara lain :

- Mucikari (pengelola)

orang yang diberikan tanggung jawab oleh pemilik wisma, untuk mengelola tempst tersebut dan bertanggung jawab terhadap para pekerja. Baik pekerja seks, penjada an semua yg menjadi bagian bisnis dalam wisma tersebut. Para mucikari tentu saja juga mendapat imbalan dari pekerjaan mereka.

- Calo (taikong)

Bertugas untuk merekrut perempuan dan gadis dari daerah asal kemudian mengirim mereka untuk dipekerjakan dalam bisnis seks tersebut. Biasanya calo adaah penduduk setempat yang di kenal di daerah tersebut. Calo akan memperoleh imbalan atas jasanya dari

mucikari atau pemilik rumah bordil.

- pelayan

Berperan memasarkan layanan seks dengan memberikan informasi kepada pelanggan tentang kualitas para pekerja seks beserta 'aturan main', jenis layanan, tarif dan jenis layanan seks. Mereka juga berfungsi sebagai perantara. Dengan mengantar peanggan kepada pekerja seks dan sebaliknya.

- penjaga keamanan

Berperan sebagai pelindung bagi pekerja seks dari pelanggan mereka dan penduduk di daerah lokalisasi. Jika pekerja seks tidak bebas meninggalkan rumah bordil, mereka juga bertugas untuk menjags agar pekerja seks tersebut tidak melarikan diri.

Partai Politik, memiliki pengaruh akan keterlibatannya dengan berbagai pihak. Bagaimana partai politik mampu mengkondisikan dan memanfaatkan bisnis prostitusi di wilayah tersebut.

Penelitian kali ini di khususkan pada daerah prostitusi besar di Surabaya yaitu gang Dolly yang terletak di jl.Kupang Gunung Timur dan jl.Raya jarak,kecamatan Sawahan Surabaya.Unit analisis dalam penelitian 'Politik Prostiotusi Kota Surabaya' dengan study kasusnya mengenai kaum Dolly. Disini mengamati tentang eksistensi Dollymelalui sudut pandang politik yang memiliki kekuatan hingga dapat terus bertahan hingga saat ini. Sebagai wilayah prostitusi yang besar, tentunya Dolly merupakan zona yang menarik dan strategis melalui sudut pandang kepentingan dan politik.

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang merupakan prosedur prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupakata-kata tertulis ataulisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati dan ditujukan agar penelitian dapat memperoleh data secara komprehensif. Subyek penelitian tertuju pada Politik Prostitusi yang terkenal di Surabaya, dengan meneliti mulai dari awal mula berdirinya Dolly hingga berkembangnya tempat prostitusi tersebut, serta mewawancarai pihak yang terkait dalam kegiatan bisnis tersebut. Mencakup para pengelola wisma, pekerja seks komersil, Ketua Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), hingga pemerintah kota Surabaya, Dinas Sosial, dan yayasan yang berkecimpung di dalamnya.

Subyek di peroleh melalui snowball sam-

pling, dimana dalam snowball sampling terdapat informan kunci yang akan mengarahkan kepada informan yang lain. Teknik pengumpulan data menklarifikasi data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan data kualitatif, yaitu dengan menggambarkan melalui kalimat-kalimat yang merupakan informasi mengenai keadaan sumber data, di saring dan pisah-pisahkan dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan maka analisa yang di gunakan adalah analisa kualitatif. Metode ini lebih menggunakan pemikiran yang logis, analisalogika dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sebagainya. Lalu data tersebut di kumpulkan, di baca, di telaah, di kelompokkan kemudian diinterpretasikan dengan pemaparan secara mendalam.

III. PEMBAHASAN

Awal Keberadaan Dolly

keberadaan daerah prostitusi Dolly berawal dari suatu kisah seorang wanita (nama asli di samarkan atas permintaan dari pihak keluarga yang bersangkutan) berasal dari daerah Bantaran – Malang. Lalu dia menikah dengan seorang pria keturunan Belanda, seorang pelaut bernama Chavid dan memiliki seorang anak bernama Edward Chavid (Eddy Yoseph). Namun suaminya yang seorang pelaut harus meninggalkan keluarganya. Timbulah rasa sakit hati di dalam perasaan wanita ini, wanita tersebut mengubah namanya mejadi Dolly Chavid dan memilih untuk menjadi seorang penyuka sesama wanita (lesbi). Gaya berpakaianya pun lebih maskulin. Beberapa wanita di daerah Malang di nikahi olehnya, dan diapun di panggil dengan sebutan papi Dolly. mulai dari tahun 1967-an dia mendirikan tempat bordil di daerah di bawah kembang Kuning. Namun karena mendapat perlawanan oleh warga pada saat itu. maka di amindahkan bisnis prostitusinya tersebut ke daerah Kupang Timur. Walau dia membuka tempat prostitusi di Surabaya, namun istri-istrinya tetap bertempat tinggal di Malang. Dolly memang terkenal dengan bisnis rumah bordilnya, namun di Malang sana dia masih di hormati karena dia merupakan orang yang kaya raya. Dolly meninggal pada Tahun 1989, karena di anggap sebagai perintis maka namanya di gunakan untuk sebutan daerah tersebut. Seiring

dengan waktu, semakin banyak orang yang membangun bisnis bordil di daerah gang Dolly tersebut.

tahun 1980-an Dolly sudah merupakan kawasan yang ramai, saat itu kota Surabaya di pimpin oleh Walikota bapak Muhaji Wijaya. Pada tahun 1987, Dolly pun di kuasai oleh Angkatan Militer. Wisma yang berada di sana merupakan milik aparat, itulah yang melatar belangi Dolly masih terus ada hingga sekarang. Pada tahun 1990-an, perlahan banyak investor swasta mulai masuk untuk memiliki wisma di daerah Dolly. Namun hal tersebut tidak mengubah pengaruh para aparat Militer di daerah tersebut.

Komoditas Pelacuran dan Perdagangan Orang (trafficking)

Dalam bisnis prostitusi di daerah dolly, para pekerja seks tidak sadar bahwa mereka berada dalam situasi trafficking. Mereka yang berada di sana memiliki keterikatan, para PSK tersebut tidak dapat meninggalkan wismanya sebelum melunasi hutang mereka. Yang di maksud hutang itu antara lain biaya mereka menginap, biaya mereka menggunakan kamar mandi, biaya mereka makan dan lain sebagainya, yang di mana segala hutang itu adalah apa yang mereka gunakan dan mereka butuhkan se hari-hari. Mereka mandi dan makan adalah kebutuhan yang penting dan termasuk rutinitas hidup sehari-hari. Itupun masih di hitung sabagi hutang, dan mereka harus dapat melunasinya. Mereka pun tidak mengerti berapa total hutang yang harus di bayar. Para PSK pun tidak di perbolehkan keluar dari wisma. Seperti ke swalayan ketoko terdekat, semua itu harus sesuai izin dan itupun mereka harus di kawal oleh para pengaman wisma tersebut, dengan maksud agar tidak melarikan diri.

Dari informasi tersebut, dapat dikatakan bahwa mereka terikat dan para PSK pun banyak yang tidak memiliki kartu Identitas, hal itu sebenarnya di ketahui baik oleh MUSPIKA dan badan setempat. Namun mereka masih di perbolehkan tinggal dan di catat datanya secara seadanya.

Kebijakan dalam Eksistensi Dolly

Wacana mengenai segal ahil tentang lokalisasi Dolly yang dirasa penuh dengan kecaman tidak membuat aorang-aoranmg di wilayah tersebut merasa khawatir. tidak

sekali pun terlihat rasa takut akan pengusiran maupun aksi yang mengancam kehadiran mereka. Ketakutan mereka hanyalah apabila apa yang mereka lakukan diketahui oleh anak dan keluarganya di kampung halaman mereka. Sebagian besar para PSK adalah orang yang sudah menikah atau memiliki anak.

Dolly memiliki sistem tersendiri yang dibuat oleh oknum yang berperan di dalamnya, sedangkan Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanyalah bagian dari formalitas. Mereka tidak bisa memberikan keterangan secara pasti mengenai legalitas wilayah prostitusi tersebut. Melihat peta kota Surabaya yang terdapat di dinas Tata Ruang dan Kota Surabaya, daerah Putat Jaya diberi warna kuning yang berarti tempat tersebut dianggap sebagai tempat pemukiman. Mereka pun sendiri merasa tidak perlu menutup tempat prostitusi tersebut karena mereka menganggap bahwa mereka tidak pernah membuka tempat prostitusi tersebut. Sehingga di biarkan tempat tersebut tertutup dengan sendirinya. Lalu apa bedanya dengan pedagang kaki lima yang di gusur karena dianggap tidak memiliki perizinan, pemerintah kota pun tidak pernah membuat para pedagang tersebut berjualan. Tetapi mengapa harus di gusur.

Pemetaan Kekuatan Politik Wilayah Dolly

Di balik ketidakpastian legalitas mereka, Dolly sebenarnya memiliki sistem sendiri dalam mengatur keberadaannya, originalitas kepemilikan Dolly yang di sembunyikan, sehingga perlunya di buat suatu mekanisme kerja dan sistem pengaturan serta kepastian akan birokrasi, sehingga dapat memberi keterangan kepada pertanyaan orang awam akan kehadirannya hingga saat ini.

Melalui hasil wawancara dengan salah satu informan, beliau menceritakan pada tahun 1987 seluruh Dolly di kuasai oleh pihak Militer, dari ABRI sampai Angkatan Laut. Mereka memiliki wisma-wisma di sana, bisa dimengerti karena pada saat itu adalah masa orde baru di mana militer mulai berkuasa. Dan hal itu masih membekas hingga sekarang dalam kekuatan dan kekuasaan militer di kawasan prostitusi Dolly. Wisma yang dimiliki oleh aparat pun di sembunyikan identitas aslinya. Adanya berita mengenai keterlibatan pihak Militer dalam bisnis prostitusi Dolly dapat di buktikan salah

satunya dengan melihat kembali kasus Mamy Rose. Kejadian tersebut terjadi berawal dari Sumiarsih yang memiliki pencaharian sebagai PSK yang menerima tawaran dari Letnan Kolonel Purwanto untuk mengelola wisma milik Letnan tersebut yang bernama Sumber Rejeki. Namun karena wisma tersebut sepi, sehingga Sumiarsih (mamy Rose) terlambat untuk memberikan setoran. Setiap Letnan Kolonel Purwanto menagih di laporkan selalu melakukan kekerasan, sehingga mamy Rose merasa tidak tenang. Kasus tersebut berakhir dengan memberikan hukuman mati kepada mamy Rose.

Walau di setiap wisma selalu terpasang tulisan yang melarang untuk militer masuk, namun beberapa pernyataan mucikari itu hanya berlaku bagi mereka yang mengenakan seragam. Sedangkan kalau sudah memakai busana bebas, siapapun boleh masuk ke dalam wisma tersebut, tanpa memperdulikan apa gelar orang tersebut.

Dalam pengaturannya yang memiliki legitimasi tertinggi di kawasan prostitusi tersebut adalah MUSPIKA, yang terdiri dari KORAMIL, POLSEK dan Camat. Pihak KORAMIL walau tidak selalu terlihat, tapi masih melakukan patroli seketika waktu. Seperti halnya pada waktu melaksanakan penelitian, pada siang hari di adakan pemeriksaan kesehatan oleh PUSKESMAS kepada para PSK, di sana terdapat beberapa KORAMIL yang begitu bersahabat baik dengan saya dan para orang-orang yang ada di sana. Beliau mengatakan kehadirannya adalah untuk memeriksa ketertiban. Dari Kepolisian terlihat adalah seringnya berpatroli pada malam hari.

Seluruh peraturan yang di tetapkan di sosialisasikan kepada seluruh pihak yang terkait, antara lain Lurah, RW, RT dan semua yang diikuti sertakan untuk pelaksanaan berbagai keputusan yang ada. Semua itu melahirkan suatu kekuatan politik yang saling berhubungan satu dengan lainnya atas dasar visimisi mereka di tengah zona tersebut.

Seperti halnya saat para PSK memberi pelayanan kepada konsumen, maka pembayaran akan di lakukan di kasir, lalu pihak kasir memberikan kepada mucikari, namun harus tetap memberikan imbalan kepada pelayan yang di luar. Pihak kasir tidak dapat memberi kebohongan karena nilai upah yang di berikan kepada mucikari akan

mempengaruhi imbalan yang diterima oleh PSK dan pelayan. Tentu dalam hal ini tidak ada yang ingin dirugikan. Untuk keamanan setiap konsumen ditarik dana Rp. 5000,- dan dana itu digunakan untuk membiayai pramuka KORAMIL dan biaya keamanan LINMAS dan KAPOLSEKTA dan MUSPIKA. Namun dari transaksi tersebut mereka tidak dapat memberikan bukti tertulis karena dianggap hanya sebagai iuran.

Partai Politik dalam prostitusi Dolly

Dolly sebagai wilayah yang ramai tentu merupakan sasaran yang baik untuk memperluas kekuasaan demi mendapat keuntungan, terutama dari segi ekonomi. Pada masa pemerintahan orde baru dimana Dolly banyak dikuasai oleh Militer namun Partai Persatuan Pembangunan telah berada di daerah tersebut, sempat dikatakan bahwa daerah tersebut merupakan lahan hijau, namun karena pada saat itu merupakan masa orde baru, maka Golongan Karya pun mulai mengambil alih daerah tersebut dengan mengadakan kunjungan setiap hari Jumat. Seiring dengan waktu, Partai Demokrasi Indonesia mulai mengambil alih, dan hingga kini partai tersebut masih memberikan pengaruh terhadap wilayah Prostitusi tersebut. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara dan dapat kita tanyakan sendiri kepada para pengurus kecamatan dan lain-lain. Mereka mengakui bahwa mereka adalah orang merah, dan semua yang berada di sana mayoritas adalah orang merah atau pendukung dari Partai Demokrasi Indonesia, dan kini berubah dengan nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Apabila dilihat dari segi pelaku yang mengaku bahwa mereka adalah orang merah, maka terlihat adanya pengaruh dari Partai di lokasi prostitusi tersebut. Walau sebenarnya para PSK sendiri mengaku tidak tahu menahu mengenai nama-nama partai dan apa kegiatan politik di dalamnya. Namun para PSK merupakan sasaran saat mengadakan kampanye, menarik massa yang banyak dan tentu dari keuntungan ekonomi mereka sangat menguntungkan.

IV. KESIMPULAN

- Dolly merupakan kawasan prostitusi yang telah memiliki kekuatan politik sendiri yang

berdasar dari berbagai keuntungan yang dihasilkan. Mereka mengatur sendiri segala kebijakan yang berlaku untuk membentuk sistem kerja para pelaku prostitusi yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Terjadi kecurangan sangatlah kecil di akibatkan dari berbagai pihak tidak ingin ada yang dirugikan.

- Kekuatan Dolly sebagian besar berasal dari kekuatan serta peran aparat militer yang dari tahun 1980-an telah mulai menguasai Dolly dan kepemilikan wisma mayoritas milik aparat militer. Wewenang akan mereka yang memiliki kekuasaan dan wewenang merupakan hal yang sangat mempengaruhi dalam eksistensi prostitusi Dolly selama ini.

- Kurangnya ketegasan pemerintah mengenai legalitas Dolly, kawasan ini disebut sebagai kawasan politik abu-abu, karena segala sesuatu yang ada di sana marked melalui berbagai hal yang memperlihatkan secara nyata.

- Berbagai keuntungan dihasilkan terutama dari segi ekonomi, hal inilah yang membuat Dolly sebagai wilayah yang mana banyak sekali diperebutkan.

- Ikut serta partai politik pun kurang terlihat secara nyata, namun melalui keterangan dan wawancara, partai politik melebarkan kekuasaannya secara perlahan di daerah tersebut. Hal itu dapat dilihat melalui berbagai stigma masyarakat setempat dengan partai yang berkuasa saat ini.

Daftar Pustaka

Abdul Syahni (2002) 'Sosiologi, skematika, teori dan terapan', Jakarta; Bumi Aksara, Sinar Grafika Offset.

Atonio Gramsci (2002) 'Catatan-catatan politik', Surabaya; Pustaka Prometheus. Bernard E. Brown; Roy C. Macridis (1996) 'Pebandingan Politik', Jakarta; Penerbit Erlangga..

Drs. Arbi Sanit (1987) 'Sistem Politik Indonesia, Kestabilan peta kekuatan politik dan pembangunan', Jakarta; Grafika Offset.

F. Isjwara S.H.L.L.M (1999) 'Pengantar ilmu politik', Bandung; Putra Arbadin.

Louis Brown (2001) 'Sexslaves'. Jakarta.

IPEC, Program Internasional penghapusan pekerja anak (2004) 'Perdagangan Anak untuk tujuan pelacuran di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur'.

SP Varma (2001) 'Teori Politik Modern', Rajawali pers.